

2021



**BPK PERWAKILAN
PROVINSI DKI JAKARTA**
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

www.jakarta.bpk.go.id

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi DKI Tahun 2021 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis (Renstra) BPK.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dituangkan dalam Renstra Perwakilan DKI Jakarta Tahun 2020-2024, mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Renstra BPK *Wide* dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Pencapaian Renstra Perwakilan DKI Jakarta diukur dengan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. LAK ini berisi pencapaian dan evaluasi atas Sasaran Strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. LAK merupakan salah satu parameter untuk meningkatkan kinerja dan memperoleh masukan perbaikan atau umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pada Tahun Anggaran 2021, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33.715.655.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp33.524.483.162 (99.43%) dengan jumlah anggaran dan realisasi tersebut memperoleh capaian skor kinerja atas 13 (tiga belas) target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah 100.05 atau secara keseluruhan dapat melebihi target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan upaya peningkatan capaian kinerja sebagai salah satu upaya mendukung visi, misi dan tujuan BPK serta mendorong percepatan reformasi birokrasi yang menghasilkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan Auditorat Keuangan Negara V, Ditama Revbang, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, serta pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja tahun 2021.

Semoga capaian dan evaluasi kinerja tahun 2021 ini, menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk berkinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 31 Januari 2022
Kepala Perwakilan,

Dede Sukarjo
NIP 197204181994011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.....	2
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.....	6
E. Isu Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.....	12
1. Visi.....	12
2. Misi.....	12
3. Nilai Dasar.....	12
4. Tujuan.....	13
5. Sasaran Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK)	16
BAB III PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pencapaian Skor Indikator Kinerja Tahun 2021.....	17
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Skor Indikator Kinerja.....	18
1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.....	18
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.....	20
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	22
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.....	23
5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan.....	24
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik	

Lokal.....	25
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.....	26
8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP.....	27
9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	28
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	30
11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.....	32
12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.....	32
13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.....	34
C. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pembagian Penugasan Subauditorat pada Entitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	4
Tabel 2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan	6
Tabel 3	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	6
Tabel 4	Anggaran Kegiatan Pemeriksaan.....	7
Tabel 5	Anggaran Kegiatan Setjen dan Pendukung.....	8
Tabel 6	Tanah dan Gedung Bangunan.....	8
Tabel 7	Peralatan dan Mesin.....	8
Tabel 8	Jalan.....	9
Tabel 9	Irigasi.....	9
Tabel 10	Jaringan.....	10
Tabel 11	Aset Tetap Lainnya.....	10
Tabel 12	APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2016-2021.....	11
Tabel 13	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021.....	16
Tabel 14	Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	17
Tabel 15	Capaian IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemrolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.....	19
Tabel 16	Capaian IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.....	21
Tabel 17	Capaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	22
Tabel 18	Capaian IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.....	24
Tabel 19	Capaian IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.....	24
Tabel 20	Capaian IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.....	25
Tabel 21	Capaian IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.....	26
Tabel 22	Capaian IKU 8 Hasil Evaluasi atas AKuntabilitas Kinerja.....	28
Tabel 23	Capaian IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	29
Tabel 24	Capaian IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	30
Tabel 25	Capaian IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.....	32

Tabel 26	Capaian IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi...	33
Tabel 27	Hasil Penilaian Biro Keuangan atas EKA, EPA dan Tingkat Kinerja Anggaran.....	34
Tabel 28	Capaian IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.....	35
Tabel 29	Dukungan Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.....	36
Tabel 30	Pagu dan Realisasi Anggaran RKP TA 2021.....	38
Tabel 31	Pagu dan Realisasi Anggaran RKSP TA 2021.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	5
Gambar 2	Sasaran Strategis	13
Gambar 3	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	14
Gambar 4	Alur Pikir Pengembangan Renstra	15
Gambar 5	Grafik Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi	21
Gambar 6	Grafik Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah /Perusahaan	21
Gambar 7	Grafik Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi	27
Gambar 8	Tampilan SIUTI (Sistem Informasi Umum dan TI)	28
Gambar 9	Pemenuhan Jam Diklat	30



SMART AND GREEN

Budaya Kerja yang bersifat Dinamis, Kreatif, dan Berintegritas dimana selalu Mengedepankan Teknologi dan Efisiensi dalam Bekerja dengan Menciptakan Kondisi Kerja yang Nyaman untuk Meningkatkan Produktivitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, namun juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Pasal 520 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Pasal 522 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

1. Sekretariat Perwakilan;
2. Subauditorat DKI Jakarta I;

3. Subauditorat DKI Jakarta II;
4. Subauditorat DKI Jakarta III;
5. Subauditorat DKI Jakarta IV; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing tugas pada Sekretariat Perwakilan, Subauditorat, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan;
- e. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- f. Subbagian Hukum.

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Sekretariat Perwakilan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

2. Subauditorat pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Subauditorat pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Subauditorat DKI Jakarta I, Subauditorat DKI Jakarta II, Subauditorat DKI Jakarta III dan Subauditorat DKI Jakarta IV yang mempunyai tugas:

- a. pada entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk:
 - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

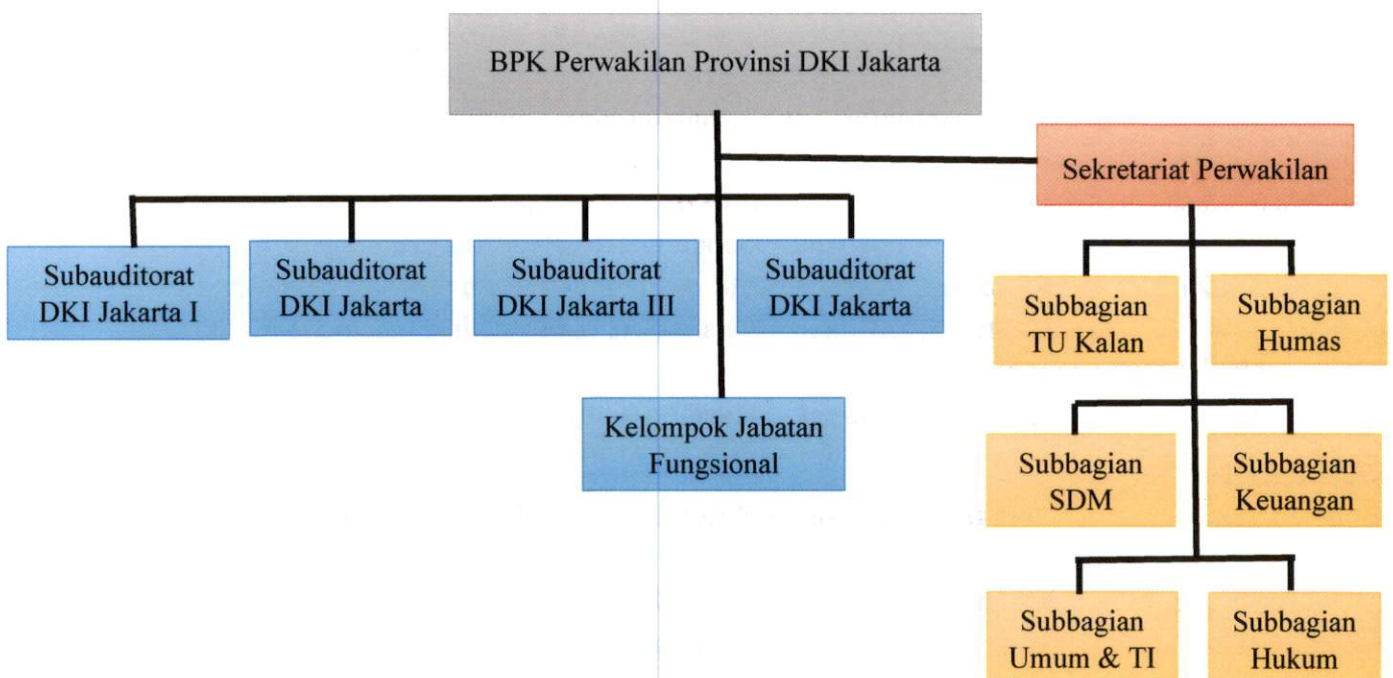
Pelaksanaan tugas masing-masing Subauditorat pada entitas di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibagi berdasarkan fungsi entitas, yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perwakilan tentang Entitas Pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Pembagian Penugasan Subauditorat
pada Entitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Subauditorat	Pembagian Entitas	Nama Entitas
Subauditorat DKI Jakarta I	entitas yang memiliki fungsi pemerintahan dan unit pelaksana teknis daerah terkait	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Kota Administrasi Jakut; Kota Adm. Jakpus; Kota Adm. Jaktim; Kota Adm. Jakbar; Kota Adm. Jaksel; Kab. Adm. Kep. Seribu; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Badan Pengelolaan Aset Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamomng Praja.
Subauditorat DKI Jakarta II	entitas yang memiliki fungsi pengelolaan pajak daerah, unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas, serta BUMD	Badan Pendapatan Daerah; Badan Pembinaan BUMD; PT. Bank DKI; PD Pasar Jaya; PT. Pembangunan Jaya Ancol; PT. Penjaminan Kredit Daerah Jakarta; PD Dharma Jaya; PT Food Station Tjipinang Jaya; PT MRT Jakarta; PT Jakarta Tourisindo; PT Jakarta Propertindo; PT Transportasi Jakarta; PD Pembangunan Sarana Jaya; PD PAM Jaya; PD PAL Jaya; PT JIEP.

Subauditorat	Pembagian Entitas	Nama Entitas
Subauditorat DKI Jakarta III	entitas yang memiliki fungsi pendidikan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sumber daya dan perdagangan, kesehatan, serta unit pelaksana teknis daerah terkait	Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas SDA; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Kebudayaan; Badan Pengembangan SDM; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; BLUD yang berada di bawah Dinas Teknis terkait.
Subauditorat DKI Jakarta IV	entitas yang memiliki fungsi tata ruang dan lingkungan hidup, perumahan dan pekerjaan umum, perhubungan dan sosial, serta unit pelaksana teknis daerah terkait	Dinas Bina Marga; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; Dinas Sosial; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; BLUD yang berada di bawah Dinas Teknis terkait.

Berikut Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Lampiran XXII Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

1. Sumber Daya Manusia

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memiliki Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2021 sebanyak 198 orang yang terbagi menjadi:

a. Berdasarkan Golongan

Sumber daya manusia pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Golongan, sebagaimana tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	TTT	Total
1.	Kepala Perwakilan	1	0	0	0	0	1
2.	Kepala Sekretariat Perwakilan	0	1	0	0	0	1
3.	Kepala Subauditorat DKI Jakarta I	1	0	0	0	0	1
4.	Kepala Subauditorat DKI Jakarta II	1	0	0	0	0	1
5.	Kepala Subauditorat DKI Jakarta III	1	0	0	0	0	1
6.	Kepala Subauditorat DKI Jakarta IV	1	0	0	0	0	1
7.	Subauditorat DKI Jakarta I	6	21	0	0	0	27
8.	Subauditorat DKI Jakarta II	5	23	0	0	0	28
9.	Subauditorat DKI Jakarta III	6	21	0	0	0	27
10.	Subauditorat DKI Jakarta IV	5	22	0	0	0	27
11.	Subbagian Tata Usaha Kalan	1	2	1	0	3	7
12.	Subbagian SDM	2	7	1	0	2	12
13.	Subbagian Keuangan	1	7	0	0	0	8
14.	Subbagian Humas	1	4	0	0	2	7
15.	Subbagian Hukum	3	2	0	0	0	5
16.	Subbagian Umum dan TI	4	8	2	0	30	44
Jumlah		39	118	4	0	37	198

b. Berdasarkan Kelompok Jabatan

Sumber daya manusia pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kelompok Jabatan, sebagaimana tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Unit Kerja	Kelompok Jabatan						TTT	Total
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional Pemeriksa	Jabatan Fungsional Lainnya		
1.	BPK Perwakilan	1							1
2.	Sekretariat Perwakilan		1						1

No	Unit Kerja	Kelompok Jabatan						Total	
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional Pemeriksa	Jabatan Fungsional Lainnya		TTT
3.	Subauditorat DKI Jakarta I		1			27		28	
4.	Subauditorat DKI Jakarta II		1			28		29	
5.	Subauditorat DKI Jakarta III		1			27		28	
6.	Subauditorat DKI Jakarta IV		1			27		28	
7.	Subbagian TU Kalan			1	3			3	7
8.	Subbagian SDM			1	5		4	2	12
9.	Subbagian Keuangan			1	4		3		8
10.	Subbagian Humas			1	2		2	2	7
11.	Subbagian Hukum			1	4				5
12.	Subbagian Umum TI			1	11		2	30	44
Jumlah		1	5	6	29	109	11	37	198

2. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memperoleh pagu Anggaran sebesar Rp33.715.655.000,00, yang terdiri dari:

- Anggaran Kegiatan Pemeriksaan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp9.245.807.000,00, sebagaimana dalam tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Anggaran Kegiatan Pemeriksaan

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	7.641.334.000	16 LHP
2	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	2.467.000	10 LHP
3	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	2.100.000	1 Laporan
4	Sumbangan IHPS Perwakilan	5.900.000	2 Laporan
5	Laporan Profil Entitas Perwakilan	26.500.000	1 Laporan
6	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	210.708.000	2 Laporan
7	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan	51.182.000	2 Laporan

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
	Provinsi DKI Jakarta		
8	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1.305.616.000	7 LHP
	JUMLAH	9.245.807.000	

- b. Anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp24.469.848.000,00, sebagaimana dalam tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Anggaran Kegiatan Setjen dan Pendukung

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1	Layanan Perkantoran	21.187.082.000	1 Layanan
2	Layanan Sarana Internal	665.088.000	2 Unit
3	Layanan Prasarana Internal	226.436.000	3 Unit
4	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	872.935.000	12 Laporan
5	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.518.307.000	20 Laporan
	JUMLAH	24.469.848.000	

3. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melengkapi sarana dan prasarana kerja yang memadai, sebagai berikut.

a. Tanah dan Gedung Bangunan

Tabel 6
Tanah dan Gedung Bangunan

No	Kode	Jenis BMN	Luas Tanah/ Bangunan (m ²) /Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1.	2.01.01	Tanah Persil	8.753 m ²	175,888,101,000
2.	4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5 unit	111,132,157,727
3.	4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	14 unit	2,925,420,000
4.	4.04.01	Tugu/Tanda Batas	2 unit	623,124,000

b. Peralatan dan MesinTabel 7
Peralatan dan Mesin

No	Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	3.01.03	Alat Bantu	10	9,696,496,946
2.	3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	18	3,113,538,000
3.	3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7	15,638,500
4.	3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	5	551,116,961
5.	3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	11	15,377,000
6.	3.03.03	Alat Ukur	6	60,134,000
7.	3.04.01	Alat Pengolahan	1	18,000,000
8.	3.05.01	Alat Kantor	2.103	8,548,238,580
9.	3.05.02	Alat Rumah Tangga	2.943	20,958,601,849
10.	3.06.01	Alat Studio	92	623,394,490
11.	3.06.02	Alat Komunikasi	341	1,039,371,283
12.	3.06.03	Peralatan Pemancar	7	197,831,776
13.	3.07.01	Alat Kedokteran	66	835,246,150
14.	3.08.01	Unit Alat Laboratorium	12	342,717,000
15.	3.08.02	Unit ALat Laboratorium Kimia Nuklir	2	4,482,500
16.	3.08.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	17	22,036,250
17.	3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	1	800,000
18.	3.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3	6,970,500
19.	3.10.01	Komputer Unit	164	4,345,548,438
20.	3.10.02	Peralatan Komputer	446	4,333,624,184
21.	3.12.01	Alat Pengeboran Mesin	2	5,900,000
22.	3.15.04	Alat Kerja Penerbangan	2	2,400,000
23.	3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	13	1,655,567,122
24.	3.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2	2,035,000
25.	3.19.01	Peralatan Olahraga	52	174,069,000
		Total	6,326	56,569,135,529

c. Jalan

Tabel 8 Jalan

No	Kode	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1.	5.01.01	Jalan	3.927	663,531,000

d. Irigasi

Tabel 9 Irigasi

No	Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1	3,950,000

e. Jaringan

Tabel 10 Jaringan

No	Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	5.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	2	1,838,833,520
2	5.03.02	Instalasi Air Kotor	1	914,727,616
3	5.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	1	48,416,197
4	5.03.10	Instalasi Lain	12	29,221,950,732
5	5.04.02	Jaringan Listrik	5	13,791,465,398
Total			21	45,815,393,463

f. Aset Tetap Lainnya

Tabel 11 Aset Tetap Lainnya

No	Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	2,905	320,950,371
2	6.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	3	2,805,000
3	6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	20	67,206,500
4	6.05.01	Tanaman	5	875,000
Total			2,933	391,836,871

Sejak tahun 2019 s.d. 2021, pembangunan dan penataan kantor yang nyaman telah dilakukan oleh BPK Perwakilan DKI Jakarta untuk mendukung peningkatan produktifitas Pegawai, diantaranya dengan:

- 1) Penataan ruang kerja secara *open space* secara bertahap dengan fasilitas koneksi internet nirkabel/*wi-fi*;
- 2) Penyediaan dan penataan ruang diskusi terbuka (Paseban);
- 3) Penataan ruang rapat tambahan;

- 4) Penataan *Lobby* yang nyaman;
- 5) Gedung Kantor Ramah Pesepeda, dilengkapi dengan Ruang Rehat Pesepeda;
- 6) Penyediaan dan Penataan Ruang *Daycare*;
- 7) Penataan Gedung menjadi Gedung Ramah Disabilitas.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dalam Renstra BPK Perwakilan DKI Jakarta 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024, dan hasil analisa perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan.

Isu-isu strategis yang diperhatikan meliputi hal-hal berikut:

1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perlu Ditingkatkan

Tingkat tindak lanjut menunjukkan efektivitas rekomendasi sebagai langkah perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.

2. Kompleksitas atas Entitas Pemeriksaan

Kota Jakarta yang merupakan ibukota negara memegang peranan sebagai pusat perekonomian, pusat pemerintahan, sekaligus pusat pendidikan dan kebudayaan. Aktivitas tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbesar di Indonesia.

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana dalam Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12
APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2016-2021

Entitas	APBD/APBD-P (dalam Triliun Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pemprov DKI Jakarta	67,16	70,19	83,26	86,89	63,23	79,89

Jumlah APBD yang besar tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan besar dan mendasar di Jakarta, seperti kemacetan, pemenuhan air bersih, penanganan banjir, pengurangan dan pengendalian pencemaran udara, kemiskinan, pendidikan yang belum merata.

Untuk mendorong akuntabilitas, transparansi dan kebermanfaatan hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk memperhatikan isu-isu besar yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jakarta melalui perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta rekomendasi hasil pemeriksaan.

3. Peningkatan Kompetensi SDM BPK

Kesesuaian jumlah pemeriksa merupakan hal yang penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan peran, kompetensi, dan jabatan yang telah ditetapkan. Peningkatan kompetensi pemeriksa dilakukan melalui *workshop*, pendidikan dan pelatihan, serta *Focus Group Discussion* (FGD).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, nilai dasar, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Visi

Visi BPK 2020–2024 adalah menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

2. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, akan mendukung misi BPK 2020-2024.

3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK yang terdiri dari:

a. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, serta tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK tidak terkecuali BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan strategis berupa “meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

5. Sasaran Strategis

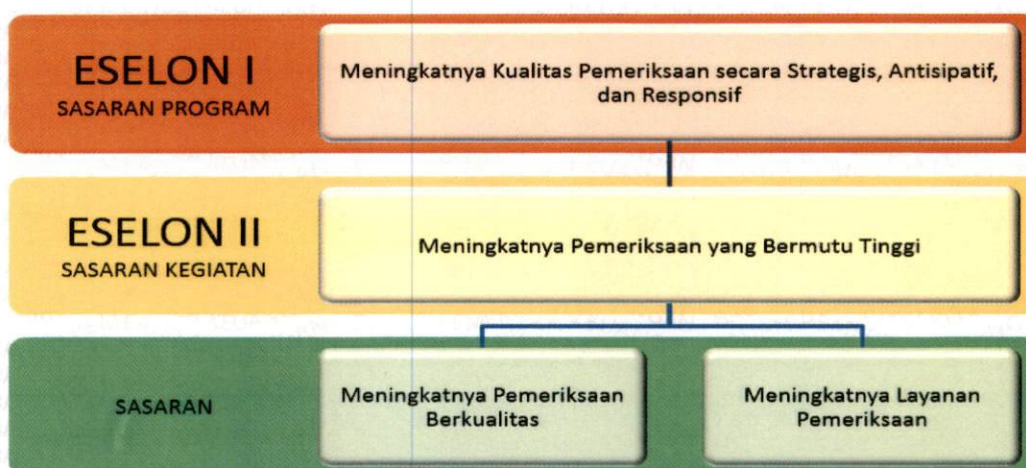
Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi dua sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas; dan
- 2) Meningkatnya layanan pemeriksaan.

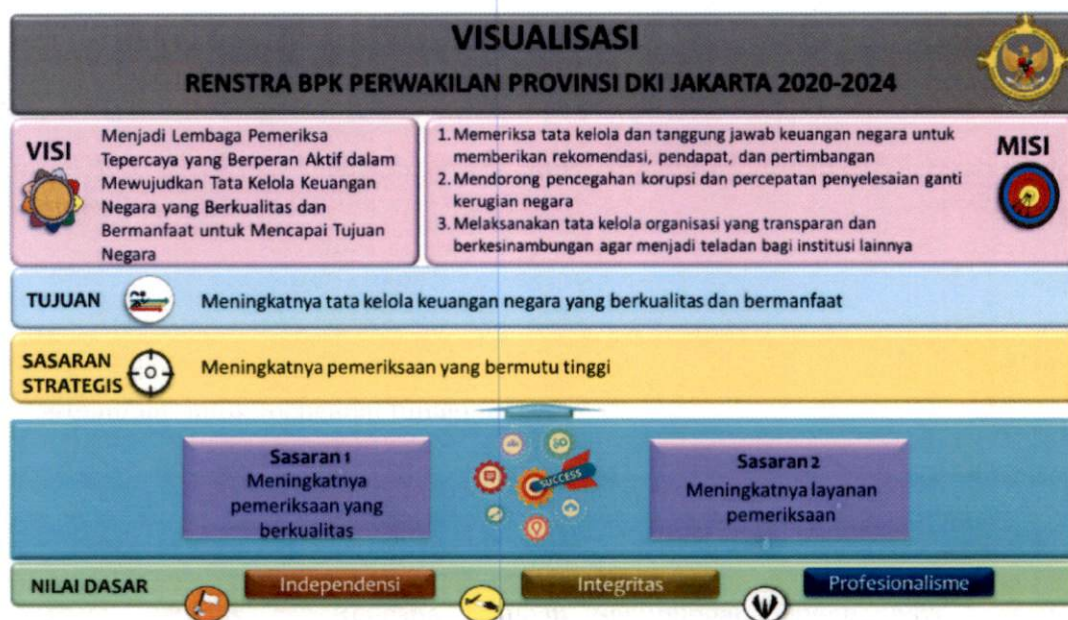
Sasaran Strategis tersebut selaras dengan Sasaran Strategis BPK yaitu “meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Sasaran strategis tersebut juga mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan AKN V yaitu “meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”, sebagaimana pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2 Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendukung salah satu strategi BPK yaitu “Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”. Untuk mendukung strategi tersebut, BPK Perwakilan DKI Jakarta menetapkan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Satker sebagaimana dalam visualisasi sebagai berikut.



Gambar 3 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

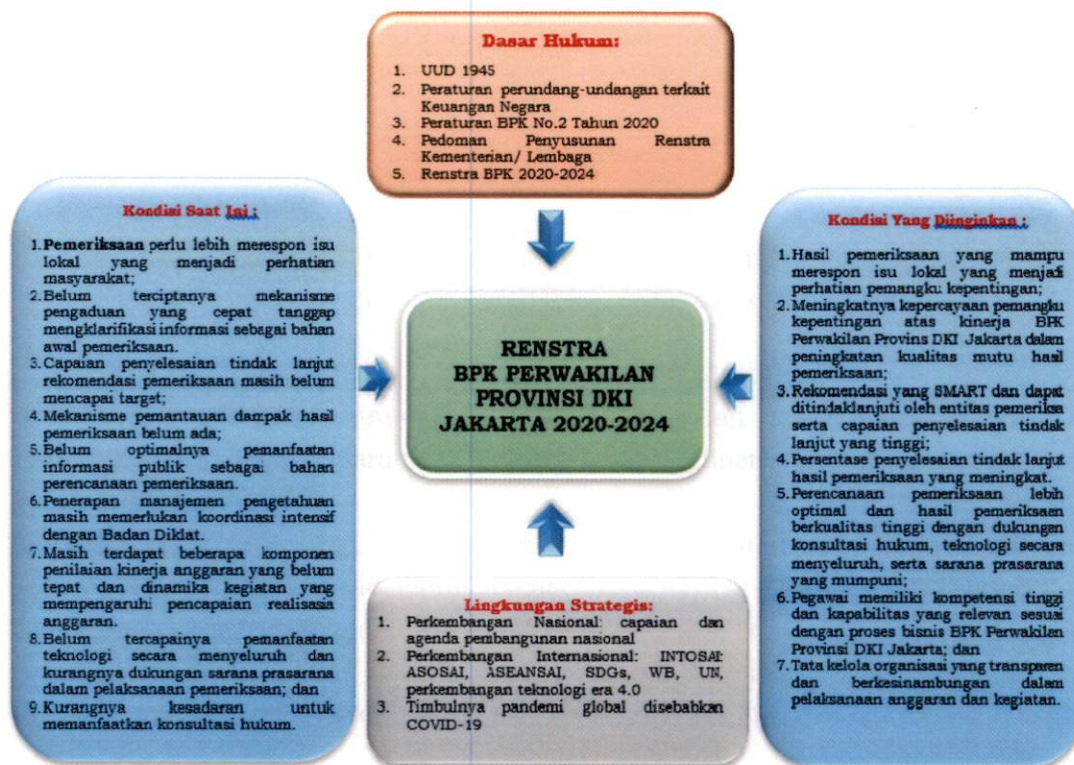
Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas “dasar hukum”, “lingkungan strategis”, “kondisi saat ini”, dan “kondisi yang diinginkan”.

Bagian “dasar hukum” memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang best practices suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI).

Bagian “lingkungan strategis” memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional.

Sedangkan, bagian “kondisi saat ini” memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*.

Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 2020-2024 dapat diilustrasikan pada Gambar 4 sebagai berikut.



Gambar 4 Alur Pikir Pengembangan Renstra

Kondisi yang diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara, dilakukan antara lain dengan:

- a. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, mensinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*.
- b. Rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART), serta dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa dan capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat.
- c. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK.
- d. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian Negara.
- e. Tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara yang dilengkapi dengan kurikulum, metode, dan media pembelajaran yang komprehensif sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi, serta didukung fasilitator yang kompeten dan manajemen yang profesional.

- g. Terwujudnya SDM BPK sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik BPK.
- h. Terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda-agenda nasional dan global.

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat PSMK telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V pada Desember 2020.

Sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut.

Tabel 13
Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target PK
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi - Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas - Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	

BAB III
PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

A. Pencapaian Skor Indikator Kinerja Tahun 2021

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 100,05. Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana pada tabel 14 berikut ini.

Tabel 14
Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Skor
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp33.715.655.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	90,00%	90,00
	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100%	100,00
- Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp9.245.807.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	79,65%	105,00
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,61%	100,61
- Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp24.469.848.000	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,35%	100,35
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,41	88,20
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	87,87	101,00
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96,00%	98,90%	103,02
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	100,00%	100,00
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,98	104,74
12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	99,38%	99,38	
13 Tingkat Kinerja Anggaran		87,50%	89,91%	102,75

Skor pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar 100,05 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan skor Tahun 2020 sebesar 95,43. Atas pencapaian skor kinerja pada Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang **belum mencapai target** yang telah ditetapkan, yaitu:
 1. IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
 2. IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
 3. IKU 12 tentang Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
2. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang **mencapai target** sesuai target yang ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 2 tentang Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
 - b. IKU 5 tentang Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan
 - c. IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
3. Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang **melebihi target** yang ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 3 tentang Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 - b. IKU 4 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
 - c. IKU 6 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
 - d. IKU 8 tentang Hasil Evaluasi AKIP
 - e. IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
 - f. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
 - g. IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Skor Indikator Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis Pencapaian Indikator Kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan capaian Indikator Kinerja Tahun 2021, sebagai berikut.

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal Satuan Kerja melalui hasil evaluasi EPP dan hasil revidit. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Berdasarkan pengukuran, pencapaian pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan tahun 2021 adalah sebesar 90% dari target seharusnya 100%. Meskipun belum memenuhi target di tahun 2021, namun realisasi pencapaian tahun 2021 sebesar 90% tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibanding realisasi tahun 2020 sebesar 75% sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 15 Capaian IKU 1
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU	Target			Realiasi			Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IKU 1							
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	75%	90%	90%

Capaian tersebut diukur berdasarkan hasil pemenuhan QA dan QC, Hasil Evaluasi EPP dan Hasil Reviu Itama sebagai berikut.

- a. Hasil Pemenuhan QA dan QC dengan nilai 100%;
- b. Hasil Evaluasi EPP dengan nilai 80%, yang terdiri dari:
 - 1) Tingkat Konsistensi atas LHP dengan nilai 50%; dan
 - 2) Tingkat Akurasi atas LHP dengan nilai 100%.
- c. Hasil Reviu Itama dengan nilai 100%.

Penilaian tersebut dilakukan atas 16 (enam belas) kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021.

Ketidaktercapaian target 100% pada Tahun 2021 dikarenakan hasil evaluasi EPP untuk Tingkat Konsistensi atas LHP hanya sebesar 50%, meskipun Tingkat Akurasi atas LHP adalah 100%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan tetap meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, memastikan keakuratan dan terutama meningkatkan konsistensi penyajian pada LHP.

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP digunakan pemeriksa mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan pengukuran, realisasi pencapaian tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan tahun 2021 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut diukur dari hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam LHP dengan Harapan Penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP periode Triwulan IV Tahun 2021, atas 15 (lima belas) LHP yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, keseluruhannya memiliki Simpulan yang sesuai dengan harapan penugasan, sehingga realisasi pencapaian indikator ini adalah sesuai target yaitu sebesar 100%.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 adalah atas Pemeriksaan sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Unit Hunian yang Terjangkau dan Berkelanjutan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran (TA) 2018 s.d. TA 2020 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- b. Pemeriksaan Kepatuhan atas Aktivitas Operasional dan Penugasan pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- c. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait lainnya;
- d. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 TA 2021 pada Pemprov DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- e. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Penataan Ruang Wilayah TA 2020 s.d. TA 2021 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- f. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja dalam rangka Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing TA 2020 dan TA 2021 (semester I) pada Pemprov DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta;
- g. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis TA 2020 s.d. 2021 (semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- h. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan TA 2019 s.d. Semester I TA 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya;

- i. Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Prov DKI Jakarta TA 2020 dan Semester I TA 2021 pada Pemerintah Prov DKI Jakarta;
- j. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya;
- k. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Bidang Jalan, Kelengkapan Jalan, Penerangan dan Sarana Umum Jalan TA 2021 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- l. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kabupaten Adm Kep Seribu TA 2021 pada Pemprov DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Kep Seribu;
- m. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa dan belanja Modal TA 2021 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- n. Pemeriksaan Kepatuhan atas kegiatan Operasional PT MRT Jakarta TB 2019,2020,2021 (Semester I) pada PT Mass Rapid Transit Jakarta;
- o. Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku (TB) 2020 s.d. Semester I TB 2021 pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.

Pada tahun 2019 dan 2020, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan capaian sebesar 100% sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 16 Capaian IKU 2
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU	Target			Realiasi			Realisasi Tahun 2021
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Dibanding Target Kinerja 2024
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mendukung tetap tercapainya target kinerja tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan tetap meningkatkan kualitas LHP dan Program Pemeriksaan (P2) dengan berpedoman pada standar pemeriksaan.

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, upaya yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatkan kualitas Program Pemeriksaan (P2) agar dapat dilaksanakan secara optimal dalam kegiatan Pemeriksaan, sehingga mutu pemeriksaan dan harapan penugasan dapat selalu tercapai.

3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Berdasarkan pengukuran, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tahun 2021 adalah sebesar 79,65% melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%.

Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 8.565 rekomendasi ditambah jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 282 rekomendasi, dari total 10.528 rekomendasi yang disampaikan kepada auditee selama periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2021.

Perbandingan pencapaian target Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tahun 2019 s.d. 2021 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut.

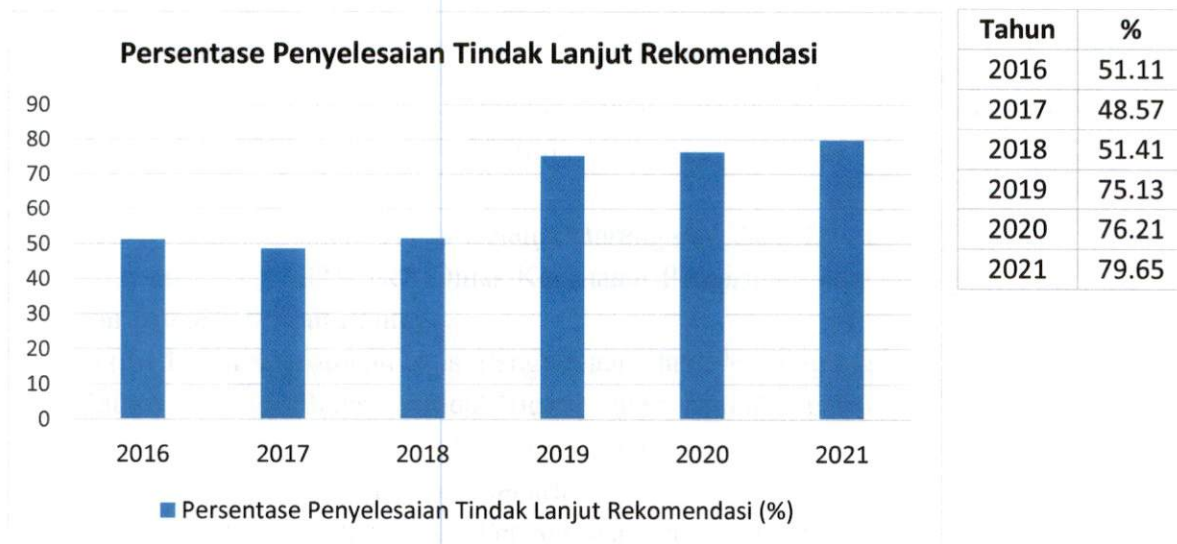
Tabel 17 Capaian IKU 3
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU	Target			Realiasi			Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IKU 3							
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75,70%	76,21%	79,65%	106.2%

Capaian atas IKU ini merupakan dampak dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan komitmen BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemantauan.

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah dengan melaksanakan Pemantauan tindak lanjut secara *Three Partied* yang melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Entitas, dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dhi .aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).

Berikut grafik Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tahun 2016. s.d. 2021.



Gambar 5 Grafik Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi

4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kontribusi Perwakilan terkait pemeriksaan tematik. Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/mandatory, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan.

Tema pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan pimpinan BPK, dengan memperhatikan isu strategis yang sedang berkembang dan menjadi permasalahan utama. Dari tema tersebut, dilakukan analisis berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan dan terlibat dalam 2 (dua) pemeriksaan tematik nasional yaitu:

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid19 TA 2021 pada Pemprov DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta; dan
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kerja sama Industri dan Dunia Kerja dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas dan Berdaya saing Tahun anggaran (TA) 2020 dan 2021 (Semester I) pada Pemprov DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.

Berdasarkan pengukuran, realisasi pencapaian Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional tahun 2021 adalah sebesar 100,61% yang artinya melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. IKU ini baru ditetapkan mulai tahun 2020, dengan perbandingan pencapaian target IKU tahun 2020 dan 2021 dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 18 Capaian IKU 4
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU	Target		Realiasi		Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2020	2021	
IKU 4					
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100,44%	100,61%	100,61%

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Pada tahun 2020, pencapaian indikator ini sebesar 100% dari target 100%. Pada Tahun 2021 tidak terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan namun pencapaian IKU ini tetap diberi skor 100%, memenuhi target yang ditentukan.

Berikut perbandingan capaian tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan tahun 2019 s.d. 2021.

Tabel 19 Capaian IKU 5
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

IKU	Target			Realiasi			Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IKU 5							
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pemeriksaan Tematik Lokal berdasarkan isu-isu strategis pada Provinsi DKI Jakarta. Isu strategis Provinsi DKI Jakarta dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

Berdasarkan pengukuran, realisasi pencapaian tahun 2020 untuk IKU ini sebesar 102% melebihi target yang telah ditetapkan (100%). IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 karena di tahun 2019 pemeriksaan tematik lokal tidak masuk menjadi IKU BPK Perwakilan.

Berdasarkan pengukuran, realisasi pencapaian pemenuhan keterlibatan satker dalam Pemeriksaan Tematik Lokal tahun 2021 adalah sebesar 100,35% melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Pemeriksaan Tematik Lokal yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 adalah "Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 (Triwulan III) pada Pemerintah Prov DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya".

Tingkat pemenuhan keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada tahun 2020 s.d. 2021 terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 20 Capaian IKU 6
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU	Target		Realiasi		Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2020	2021	
IKU 6					
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	102%	100,35%	100,35%

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan komunikasi proaktif dengan Pimpinan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menampung masukan atas isu strategis dan isu lokal untuk kemudian dilakukan pemeriksaan tematik lokal.

Dengan adanya pemeriksaan tematik lokal, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan dapat memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan yang lebih tepat sasaran, dan berdampak pada masyarakat (*foresight*). Selain itu, hasil pemeriksaan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”.

7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini merupakan Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Pengukuran capaian ini dilakukan melalui Survei Pengukuran Indeks Indikator. Berdasarkan hasil survei tersebut dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPK RI Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai capaian sebesar 4,44 kategori **Sangat Memuaskan**.

Pada tahun 2021, Hasil Pengukuran Capaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK berdasarkan Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator pada tahun 2021, adalah sebesar 4,41 termasuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

Pencapaian indikator tahun 2021 ini dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tidak jauh berbeda, masih dalam kategori yang sama. Nilai capaian selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 21 Capaian IKU 7
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU	Target			Realiasi			Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024	
	IKU 7	2019	2020	2021	2019	2020		2021
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK		5,00	5,00	5,00	4,61	4,44	4,41	88,2%

Meskipun capaian tersebut termasuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**, namun belum sesuai target yang ditetapkan, yaitu 5.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen melakukan upaya perbaikan untuk mendorong peningkatan implementasi nilai-nilai dasar BPK. Upaya yang dilakukan dalam rangka implementasi Nilai Dasar pada BPK Perwakilan DKI Jakarta diantaranya sebagai berikut.

- a. Melaksanakan Pemangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan telah mendapatkan Penghargaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 20 Desember 2021;

- b. Pengarahan Kepala Perwakilan terkait penerapan Nilai Dasar BPK pada saat *Entry Meeting* dan pada saat sebelum dilaksanakan pemeriksaan;
- c. Pemberian teladan yang baik dari para Pimpinan (baik Pimpinan sebagai *Role Model* maupun sebagai Agen Perubahan) menjadi motivasi bagi pegawai untuk menerapkannya secara berkelanjutan;
- d. *Audio Campaign* penerapan Nilai Dasar BPK;
- e. Sosialisasi Anti Gratifikasi melalui *Standing Banner*;
- f. Survei Pengendalian Gratifikasi kepada Pemeriksa dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

8. IKU 8 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Surat Keputusan Menpan Nomor KEP/135/M.PAN/09/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) setiap tahun dan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Pengukuran nilai capaian indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Itama.

Pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai 86,64 dengan predikat “A” dan memenuhi target yang ditetapkan sebesar 86,00 (A). Pada tahun 2021, apabila dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2020, terjadi peningkatan nilai capaian indikator, menjadi sebesar 87,87 (A) dari target yang ditetapkan sebesar 87 (A).

Nilai capaian selengkapnya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 22. Capaian IKU 8
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

IKU	Target			Realiasi			Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	IKU 8	2019	2020	2021	2019	2020	
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	AA (>91,00)	A (86,00)	A (87,00)	A (90,00)	A (86,64)	A (87,87)	97,09%

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian nilai evaluasi atas AKIP tahun 2019 pernah mencapai nilai 90 (A). Atas penurunan nilai evaluasi AKIP tahun 2020 menjadi 86,4 (A), BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan perbaikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 dan di tahun berikutnya.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BPK.

Pengukuran nilai capaian tingkat pemanfaatan TI ini dilakukan Laporan Monitoring Biro Teknologi dan Informasi atas Pemantauan Layanan TI. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 mendapatkan nilai capaian sebesar 98,90% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.

Capaian Indikator Tingkat Pemanfaatan TI pada tahun 2021 tetap sebesar 98,90% dan masih melebihi target yaitu 96%. Penilaian sebesar 98,90% tersebut didasarkan pada 4 (empat) tingkat pemanfaatan TI yaitu:

- a. tingkat pemanfaatan layanan dasar (100%)
- b. tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum (95,61%)
- c. tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan (100%) dan
- d. tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan.

Capaian selengkapnya sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 23 Capaian IKU 9 Tingkat Pemanfaatan TI

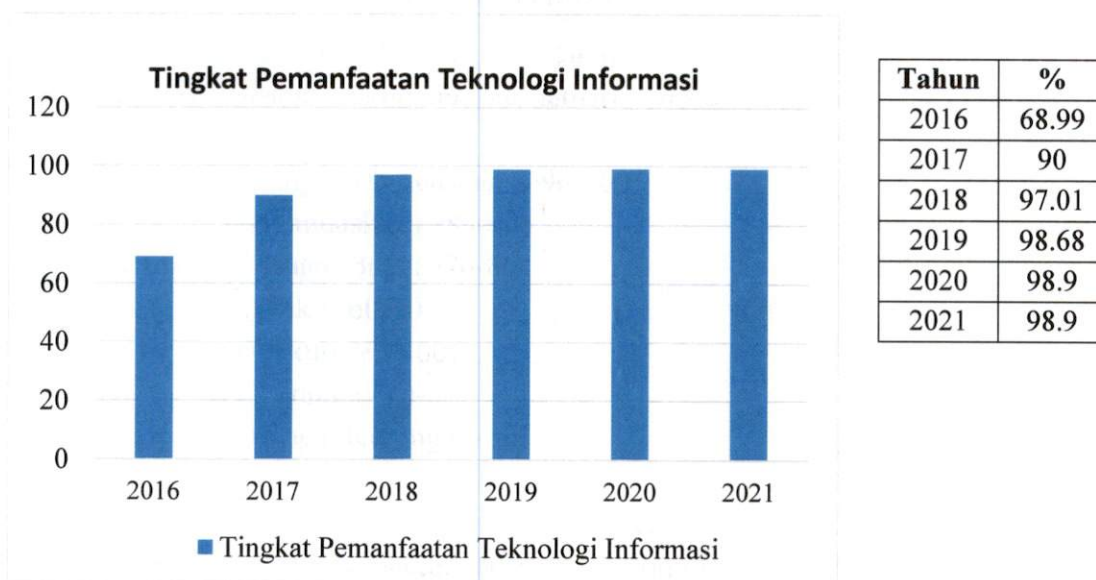
IKU	Target			Realiasi			Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IKU 9							
Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan	95%	95%	96%	98,68%	98,90%	98,90%	98,90%

Dari hasil penilaian tingkat pemanfaatan TI, terlihat dalam pelaksanaan tugas yang sudah memanfaatkan aplikasi dasar, aplikasi umum dan aplikasi pemeriksaan yang disediakan oleh Biro TI, seperti e-mail, aplikasi persuratan, e-drive, aplikasi SiAP LK, aplikasi SMP, aplikasi SISDM dan SiPTL.

Tercapainya target indikator ini didukung pula oleh kesadaran pegawai membangun Budaya Kerja “*Smart and Green*” pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta di mana di dalam budaya kerja tersebut terdapat pembangunan Budaya Kerja “SMART” yang mengoptimalkan pemanfaatan TI.

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP digunakan pemeriksa mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP).

Berikut grafik tingkat pemanfaatan TI dari tahun 2016 s.d. 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 6 Grafik Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini bertujuan untuk memastikan satker mengelola pengetahuan pegawai sehingga diharapkan tidak terjadi kesenjangan pengetahuan antar pegawai. IKU ini juga dimaksudkan untuk mendorong penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja organisasi dalam kerangka *knowledge management*.

Realisasi atas IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar 25% dari target. Hal tersebut disebabkan, diantaranya BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai Tim Manajemen Pengetahuan sehingga belum mempunyai perencanaan yang sistematis dan manajemen pengetahuan belum didokumentasikan secara tertib. Selain itu, belum adanya penganggaran terkait IKU ini pada tahun 2020.

Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah memasukkan unsur Manajemen Pengetahuan dalam Rentra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 2020-2024.

Pengukuran indikator ini dilakukan atas tingkat penyusunan *Best Practice*, Tingkat Penerapan *Best Practice* dan Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Berdasarkan pengukuran tersebut, capaian indikator tingkat penerapan Manajemen Pengetahuan pada tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi yang dicapai hanya 25% dari target yang ditetapkan 100%.

Tabel 24 Capaian IKU 10
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

IKU	Target		Realiasi		Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2020	2021	
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	25%	100%	100%

Peningkatan capaian tingkat penerapan Manajemen Pengetahuan pada tahun 2021 didukung oleh implementasi manajemen pengetahuan pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Manajemen pengetahuan yang sudah dirintis sejak 2019, yang kemudian mulai ditingkatkan pada tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*).

Best practice (BP) yang sudah dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang:

- 1) Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai *Best Practice* “Kantor Peduli Lingkungan (*Eco Office*) dan direplikasi oleh satker lain pada tahun 2020. *Eco Office* ini merupakan bagian dari Budaya Kerja “*Smart and Green*” yang diterapkan di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

- 2) Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menciptakan dan mengembangkan aplikasi *web basis* bernama SIUTI (Sistem Informasi Umum dan TI). SIUTI ini merupakan Digitalisasi Layanan Umum dan TI, yang terdiri dari Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas, Peminjaman Ruang dan Peminjaman Sarana dan Prasarana TI. Usulan *Best Practice* SIUTI telah mendapatkan persetujuan untuk diterapkan pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Pembentukan Tim Manajemen Pengetahuan melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 08a/K/XVIII.JKT/01/2021 tentang Tim Manajemen Pengetahuan pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021;
 - c. Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Melakukan aktivitas Manajemen Pengetahuan berupa *Knowledge Transfer Forum*. Selain *Knowledge Transfer Forum*, dilakukan juga kegiatan pembimbingan, dan mentoring.

Berikut ini adalah tampilan muka Aplikasi Digitalisasi Layanan Umum dan TI (Sistem Informasi Umum dan TI).



Gambar 8 Tampilan SIUTI (Sistem Informasi Umum dan TI)

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengembangkan Manajemen Pengetahuan dengan meningkatkan pengelolaan *Best Practice* dan melakukan evaluasi penerapannya agar dapat terus dilakukan perbaikan, serta dapat terimplementasi secara menyeluruh. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus meningkatkan aktivitas manajemen pengetahuan secara konsisten dari tahun ke tahun.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. IKU ini juga bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan melalui pelaksanaan survei oleh pihak eksternal.

Realisasi capaian kinerja untuk IKU ini pada tahun 2020 adalah 3,79, lebih rendah dari target yang ditetapkan (3,80). IKU ini tidak dibandingkan dengan sebelum tahun 2020 karena baru dilaksanakan pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, capaian indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 3,98 (**Memuaskan**) dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,80. Selengkapnya nilai capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 25

Capaian IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU	Target		Realiasi		Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2020	2021	
IKU 11					
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,79	3,98	104,74%

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan/diklat berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan pegawai penunjang dan pendukung (non-pemeriksaan).

Pengukuran capaian indikator ini dengan perbandingan jumlah pegawai yang memenuhi jam diklat dengan jumlah seluruh pegawai.

Berdasarkan pengukuran, realisasi capaian IKU ini pada tahun 2020 sebesar 96,79% atau lebih rendah dari target yaitu 100%. Capaian indikator ini pada tahun 2021 adalah sebesar 99,38% dari target yang ditetapkan 100%. Pada tahun 2021, jumlah

pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi jam diklat adalah sebanyak 159 orang dari jumlah total pegawai sebanyak 160 orang.

Capaian pemenuhan jam diklat selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

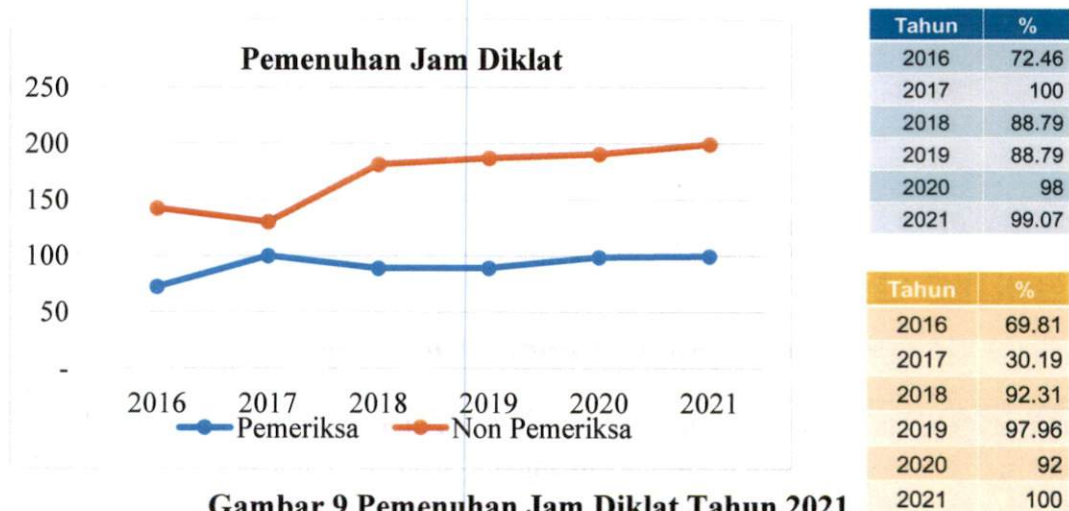
Tabel 26
Capaian IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU	Target			Realiasi			Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	IKU 12	2019	2020	2021	2019	2020	
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	97,96%	96,79%	99,38%	99,38%

Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya bekerja sama dengan Badan Diklat Pegawai BPK dan Biro TI untuk menyelenggarakan diklat sebagai berikut:

- Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual
Diklat tersebut diselenggarakan pada tanggal 25 s.d. 28 Januari 2021 secara *online/distance learning* untuk Pemeriksa yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan LKPD TA 2020 dan pegawai non pemeriksa yang melaksanakan Dukungan Pemeriksaan LKPD. Tujuan diklat ini untuk *update* pengetahuan para Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah.
- Diklat *Improving Mindfulness*
Diklat tersebut diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 11 November 2021 secara *online/distance learning* untuk pegawai Sekretariat Perwakilan. Tujuan diklat ini adalah untuk dan membantu pegawai untuk dapat melakukan manajemen pola pikir yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Berikut ini adalah grafik pemenuhan jam diklat tahun 2016 s.d. 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 9 Pemenuhan Jam Diklat Tahun 2021

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan monitoring pemenuhan jam diklat dan peningkatan pemenuhan jam diklat melalui kerjasama penyelenggaraan diklat dengan Badan Diklat.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- a. Penyerapan anggaran;
- b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- c. Pencapaian keluaran;
- d. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran penilaian capaian indikator ini berdasarkan data rekapitulasi perhitungan kinerja anggaran perwakilan yang dilakukan penilaiannya oleh Biro Keuangan. Penilaian dilakukan baik atas Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Tabel berikut adalah nilai EKA, EPA dan Kinerja Anggaran hasil penilaian Biro Keuangan tahun 2021.

Tabel 27

Hasil Penilaian Biro Keuangan atas EKA, EPA, Kinerja Anggaran

Triwulan	Hasil Penilaian (%)		
	EKA	EPA	Kinerja Anggaran
Triwulan I	90,38	96,37	92,78

Triwulan	Hasil Penilaian (%)		
	EKA	EPA	Kinerja Anggaran
Triwulan II	57,22	85,67	68,60
Triwulan III	66,16	92,73	76,79
Triwulan IV	86,01	95,76	89,91

Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan realisasi kinerja sebesar 91,27% atau melebihi dari target yaitu sebesar 87,00%. Tingkat kinerja anggaran tahun 2020 ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar 88,27%.

Pada tahun 2021, berdasarkan pengukuran capaian indikator tingkat kinerja anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2020 sebesar 91,27%. Pada tahun 2021, capaian tingkat kinerja anggaran BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 89,91% melebihi target yang ditetapkan sebesar 87,5%.

Tabel 28 Capaian IKU 13
Tingkat Kinerja Anggaran

IKU	Target			Realiasi			Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	80%	87%	87,5%	88,27%	91,27%	89,91%	100,23%

Capaian tersebut merupakan dampak dari upaya perbaikan kinerja anggaran yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 s.d. 2021 antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran antar unit kerja;
2. Menyusun RPD secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kepastian pelaksanaan rencana kegiatannya;
3. Meminta unit kerja untuk membuat rencana kegiatan dan anggarannya, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi jika ada yang belum terlaksana; dan
4. Melakukan revisi anggaran secara lebih cermat.

Selain itu, kualitas pencapaian kinerja anggaran juga dipengaruhi tingkat efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran per keluaran dan realisasi volume keluaran dengan pagu anggaran per keluaran dan target volume keluaran. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus berusaha memperbaiki kinerja anggaran dengan melakukan pengelolaan anggaran yang baik dan terencana serta memperhatikan efisiensi anggaran.

Dukungan Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2021, Perjanjian Kinerja disusun atas satu Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi” yang terbagi dalam dua strategi yaitu Strategi 1 “Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas” dan Strategi 2 “Meningkatnya Layanan Pemeriksaan” dimana kedua strategi ini tidak dibagi per tiap jenis IKU, sehingga dukungan anggaran dapat dilihat jika menjabarkan indikator kinerja keluaran dalam tabel berikut.

Tabel 29
Indikator Kinerja Keluaran beserta Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	7.641.334.000	7.584.505.618	99.26
		LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	2.467.000	2.467.000	100
		Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	2.100.000	2.093.000	99.67
		Sumbangan IHPS Perwakilan	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	5.900.000	5.229.000	88.63
		Laporan Profil Entitas Perwakilan	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	26.500.000	26.272.000	99.14
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	210.708.000	210.705.100	100
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	51.182.000	48.945.500	95.63
		LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	1.305.616.000	1.299.350.000	99.52
Total Strategi Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas				9.245.807.000	9.179.567.218	99.28

Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Anggaran	Realisasi	%
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Perkantoran	1. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	21.187.082.000	21.079.799.825	99.49
		Layanan Sarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor 2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Jumlah Pengadi Peralatan Fasilitas Perkantoran	665.088.000	664.500.000	99.91
		Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	226.436.000	223.196.490	98.57
		Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	872.935.000	870.053.924	99.67
		Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	1.518.307.000	1.512.109.863	99.59
Total Strategi Meningkatkan Layanan Pemeriksaan				24.469.848.000	24.344.915.994	99.49
Total Sasaran Kegiatan/Sasaran Strategis				33.715.655.000	33.524.483.162	99.43

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp33.715.655.000,00, yang terbagi ke dalam anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp9.245.807.000,00,- dan anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp24.469.848.000,00.

Dari alokasi anggaran tersebut, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mampu merealisasikannya sebesar Rp33.524.483.162,00 atau 99,43% dari anggaran. Pagu dan realisasi anggaran RKP dan RKSP TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 30
Pagu dan Realisasi Anggaran RKP TA 2021

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi (Rp)	%
1	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	7.641.334.000	16 LHP	7.584.505.618	99.26
2	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	2.467.000	10 LHP	2.467.000	100
3	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	2.100.000	1 Laporan	2.093.000	99.67
4	Sumbangan IHPS Perwakilan	5.900.000	2 Laporan	5.229.000	88.63
5	Laporan Profil Entitas Perwakilan	26.500.000	1 Laporan	26.272.000	99.14
6	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	210.708.000	2 Laporan	210.705.100	100
7	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	51.182.000	2 Laporan	48.945.500	95.63
8	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1.305.616.000	7 LHP	1.299.350.000	99.52
JUMLAH		9.245.807.000		9.179.567.218	99.28

Tabel 31
Pagu dan Realisasi Anggaran RKSP TA 2021

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan Perkantoran	21.187.082.000	1 Layanan	21.075.055.667	99.47
2	Layanan Sarana Internal	665.088.000	2 Unit	664.500.000	99.91
3	Layanan Prasarana Internal	226.436.000	3 Unit	223.196.490	98.57
4	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	872.935.000	12 Laporan	870.053.924	99.67
5	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.518.307.000	20 Laporan	1.512.109.863	99.59
JUMLAH		24.469.848.000		24.344.915.944	99.49

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK RI, secara umum menunjukkan adanya peningkatan pencapaian kinerja dari tahun 2018. Pencapaian skor kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, yaitu dari 95,43 menjadi 100,05.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja, antara lain:

1. Pencapaian IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan sebesar 90% yang naik signifikan dari nilai capaian tahun 2020 sebesar 75%.
2. Konsistensi pencapaian IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang memenuhi Harapan Penugasan sebesar 100% sejak 2019 s.d. 2021.
3. Pencapaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sejak tahun 2019 s.d. 2021 selalu melebihi target yang ditetapkan yaitu 75%.
4. Pencapaian IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Lokal tahun 2020 s.d. 2021 selalu melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.
5. Pencapaian IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP sejak tahun 2019 s.d. 2021 selalu melebihi target yang ditetapkan.
6. Pencapaian IKU 9 Tingkat Pemanfaatan TI sejak tahun 2019 s.d. 2021 dengan nilai diatas 98% selalu melebihi target yang ditetapkan yaitu 95%.
7. Pencapaian IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada tahun 2021 meningkat secara signifikan dari capaian tahun 2020 sebesar 25% menjadi 100% pada tahun 2021.
8. Pencapaian IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada tahun 2021 berhasil melebihi target yang ditetapkan, yaitu mencapai nilai 3,98 dari target yang ditetapkan sebesar 3,8.
9. Pencapaian IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran sejak tahun 2019 s.d. 2021 selalu melebihi target yang ditetapkan.

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
3. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Atas indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan langkah-langkah perbaikan berupa:

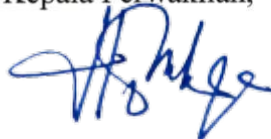
1. Mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi menjadi penyebab dan mengelola risiko kegagalan pencapaian target kinerja yang diharapkan;
2. Melakukan *cross review* atas penyusunan konsep LHP yang diterbitkan, terutama terkait konsistensi dalam penyajian LHP;

3. Mendorong Pegawai untuk terus meningkatkan Pemahaman terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional dan personalnya. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas di mata pemangku pemilik kepentingan;
4. Mengembangkan media yang dapat digunakan untuk menanamkan Nilai Dasar BPK yang sekaligus berfungsi menjalankan pengawasan atas indikasi pelanggaran atas Nilai Dasar BPK tersebut;
5. Melakukan monitoring pemenuhan jam diklat Pegawai dan melakukan kerjasama dengan Badan Diklat untuk penyelenggaraan diklat.

Upaya perbaikan yang berkesinambungan perlu terus dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peran BPK sebagai pendorong reformasi birokrasi yang menghasilkan tata kelola negara yang transparan, akuntabel dan berwibawa.

Sebagai perwujudan komitmen perbaikan yang berkelanjutan, Kepala Perwakilan secara periodik melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan kendala yang dihadapi. Dengan evaluasi tersebut diharapkan unit-unit kerja dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang efektif dalam penyelesaian kendala ketercapaian target kinerja.

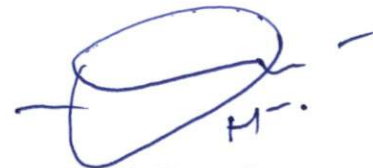
Mengetahui
Kepala Perwakilan,



Dede Sukarjo
NIP 197204181994011001

su

Jakarta, 31 Januari 2022
Manajer IKU,



Dudy Hamzah
NIP 197205051998031005